

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PEMELIHARAAN
KENDARAAN DINAS DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Negara



Oleh :

M. Fahrul Aji Romas

NIM. 07011381520116

Konsentrasi Administrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 11 Juli 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**


TIM PENGUJI SKRIPSI

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 19611251989121001
Ketua

Dra. Martina, M.Si
NIP. 19603051993022001
Anggota


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002
Anggota

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001
Anggota

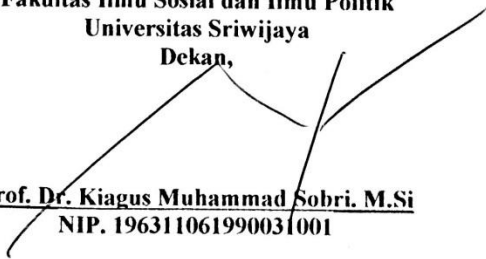








Palembang, Juli 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN PEMELIHARAAN
KENDARAAN DINAS DI DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Usulan Penelitian

Oleh:

M. Fahrul Aji Romas

07011381520116

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Oktober 2018

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si.

NIP. 196211251989121001



Pembimbing II

Dra. Martina, M.Si.

NIP. 196603051993022001



HALAMAN PERSEMBAHAN

“...Wa la tahinū wa la taḥzanū wa antumul-a'launa ing kuntum mu`minin.”

(QS. Al-Imran 3: 139)

Skripsi ini Saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Saya, Ibu Asnawati dan Ayah Romli
2. Kakak Saya Putra dan adik Saya Sultan.
3. Seluruh dosen yang senantiasa bersabar dalam membimbing Saya.
4. Sahabat Saya.
5. Almamater Saya

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Efektivitas Pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilatarbelakangi walaupun adanya alokasi anggaran pemeliharaan kendaraan dinas tetapi masih ada kendaraan dinas yang termasuk dalam daftar aset berada dalam kondisi rusak berat atau tidak dapat digunakan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengetahui permasalahan tersebut teori yang digunakan adalah Rahardjo Adisasmita yang melihat permasalahan dari 3 aspek yaitu, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan dengan baik karena dalam pelaksanaan anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan apa yang diajukan sehingga tidak efisien dalam proses pelaksanaannya masih ada kendaraan dinas yang termasuk dalam daftar aset berada dalam kondisi rusak berat atau tidak dilakukan perawatan karena anggaran tidak memadai. Penelitian ini merekomendasikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mempunyai pegawai yang mampu menangani proses pengusulan anggaran agar sesuai apa yang diusulkan sehingga bisa melakukan perawatan kendaraan dinas yang rusak.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, Anggaran, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Dinas Kelautan dan Perikanan

Pembimbing I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II



Dra. Martina, M.Si
NIP.196911191998032001

Palembang, Juli 2018
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.sos, MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This study entitled Effectiveness of Management of official vehicle maintenance budgets at the Department of Marine and Fisheries of South Sumatra Province. This research is motivated despite the budget allocation for maintenance of official vehicles but there are still official vehicles included in the list of assets that are in a state of severe damage or cannot be used. The purpose of the study was to determine the effectiveness of the Management of Vehicle Maintenance Budget in the Department of Marine and Fisheries of South Sumatra Province. To find out these problems the theory used is Rahardjo Adisasmita who looks at problems from 3 aspects, namely, planning, implementation, and supervision. This study uses qualitative methods, while for data collection techniques using observation, documentation, and in-depth interviews. The results of this study indicate that the effectiveness of the management of official vehicle maintenance budgets at the Maritime and Fisheries Service of South Sumatra Province has not gone well because the implementation of the proposed budget is not in accordance with what was proposed so it is not efficient in the implementation process. being in a state of severe damage or not being treated because of insufficient budget. This study recommends that the South Sumatra Provincial Office of Marine and Fisheries be expected to have employees who are able to handle the budget proposal process so that it fits what is proposed so that it can maintain damaged service vehicles.

Keywords: Effectiveness, Management, Budget, Service Vehicle Maintenance, Marine and Fisheries Service

Pembimbing I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II



Dra. Martina, M.Si
NIP.196911191998032001

Palembang, Juli 2018
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.sos, MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Romli. dan Asnawati. yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik secara moril maupun materil serta semangat, motivasi, bimbingan, kepercayaan, dan kasih sayang selama ini yang tiada henti.
2. Saudara laki-laki Putra Ramadhan Al-qodri., saudara laki-laki M. Sultan Alfarizi, dan seluruh sanak keluarga yang tiada henti selalu mendoakan dan memberi semangat, bimbingan, dan dukungan baik secara moril maupun materil selama ini kepada saya.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Wakil Dekan I
5. Bapak Drs. Mardianto., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, yang sabar dalam memberikan solusi terbaik, memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan ibu Ermanovida, S.sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. Mardianto., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, yang sabar dalam memberikan solusi terbaik, memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
8. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
9. Bapak Dedi, M.Si. selaku Kepala Subbagian Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajarannya.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran dari semua pihak demi skripsi ini. Semoga Skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat di kemudian hari sebagai referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Palembang, Juli 2019

Penulis

M. Fahrul Aji Romas

NIM. 07011381520116

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori.....	10
B. Administrasi Keuangan Negara	10
C. Pengelolaan Anggaran	11
D. Efektivitas	14
E. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	16
F. Kendaraan Dinas.....	17

G. Pemeliharaan Kendaraan Dinas	18
H. Teori Penelitian	20
I. Penelitian Terdahulu.....	22
J. Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Desain Penelitian.....	23
B. Aspek Penelitian.....	23
C. Fokus Penelitian	24
D. Unit Analisis Data.....	26
E. Informan Penelitian	26
F. Data dan Sumber Data	26
1. Data	26
2. Sumber Data	27
G. Teknik Pengumpulan Data.....	27
H. Teknik Analisis Data.....	28
I. Sistematika Penelitian	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum	29
1. Sejarah Dinas Kelautan dan Perikanan	37
2. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan	38
3. Struktur Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	40
B. Hasil dan Pembahasan	45
1. Perencanaan	46
2. Pelaksanaan	50
3. Pengawasan	58
BAB V PENUTUP	62
1. Kesimpulan	62
2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan yang di Pelihara Di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	5
Tabel 1.2 Jumlah Kondisi Kendaraan dan Pegawai yang Mendapatkan Kendaraan Dinas di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.....	5
Tabel 1.3 Realisasi Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	26
Tabel 4.1 Jumlah Personil PNS Maupun Non PNS di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.....	46
Tabel 4.2 Kesimpulan Dimensi Perencanaan	
Tabel 4.3 Kesimpulan Dimensi Pelaksanaan.....	
Tabe 4.4 Kesimpulan Dimensi Pengawasan	
Tebel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas Berdasarkan Ukuran Efektivitas.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 4.1 Peta Provinsi Sumatera Selatan.....	29
Gambar 4.2 Lambang Sumatera Selatan.....	32
Gambar 4.3 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	37
Gambar 4.4 lambang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan ..	38
Gambar 4.5 Susunan Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.....	39
Gambar 4.6 Prosedur Pemeliharaan Kendaraan Dinas	53
Gambar 4.7 Kendaraan Dinas Kondisi Rusak Berat	55

DAFTAR SINGKATAN

APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

BPK : Badan Pengawas Keuangan

BPKAD : Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

No : Nomor

Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri

PP : Peraturan Pemerintah

Renja : Rencana Kerja

Renstra : Rencana Strategis

RKA-SKPD : Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPBU : Rencana Pemeliharaan Barang Unit

UU : Undang-Undang

LAMPIRAN

Lampiran.....	
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007	
Surat Tugas Pembimbing.....	
Surat Tugas Pengambilan Data.....	
Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 1	
Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 2.....	
Pedoman Wawancara.....	
Tabel Matrik.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang dalam masa transisi yang ditandai dengan dilakukannya penerapan pemerintahan dengan asas desentralisasi. Pelaksanaan asas desentralisasi ini ditandai dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah pada semua daerah yang ada di Indonesia. Berlakunya Undang-undang ini juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat.

Menurut Undang-Undang tersebut otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Sumber-sumber pendanaan tersebut telah diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13/2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah. Penjelasan tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja sesuai dengan kebutuhan tetapi tetap berdasarkan pada asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Dalam menjalani roda pemerintahannya, pemerintah mempunyai 23 bidang kewenangan yang harus dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya kewenangan di bidang sosial, kesehatan, kependudukan, perhubungan dan lain-lain.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tentu saja harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan untuk pelayanan publik. Berhubungan dengan usaha pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah daerah telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap melalui penganggaran belanja modal pada tiap-tiap tahun anggarannya, sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pada akumulasi belanja modal yang telah dilaksanakan dari tahun ke tahun, berdampak pada meningkatnya jumlah dan nilai aset tetap pemerintah daerah. Peningkatan tersebut juga terjadi pada aset tetap kendaraan dinas. Peningkatan yang cukup signifikan baik dalam jumlah maupun pada aset, telah menyadarkan pemerintah untuk memiliki sebuah sistem pengelolaan aset yang baik. Kebutuhan ini terjawab dengan diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah yang dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 17/2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

Menurut Peraturan pemerintah (PP) No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 17/2007 tentang pedoman

teknis pengelolaan barang milik daerah tersebut pengelolaan barang daerah antara lain: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Tidak sekedar administratif semata tetapi berpikir lebih kedepan dalam menangani barang milik daerah dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan dapat menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang daerah tersebut ialah semua kekayaan baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Barang Milik daerah dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun Nomor 17 Tahun 2007, antara lain :

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
2. Barang yang diperoleh lainnya yang sah yaitu :
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang Milik Daerah yang secara fisik dan legal dimiliki pemerintah yang berkaitan dalam tugas pokok dan fungsinya mencakup barang milik daerah tetap yang jumlahnya sangat banyak klasifikasi barang milik daerah tetap tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Peralatan sebagai sarana pendukung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintahan sangatlah penting sebagai proses penyelenggaraan kegiatan administrasi kantor pemerintahan daerah. Untuk peralatan dan mesin terdiri mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh investaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan manfaatnya lebih dari satu tahun dalam kondisi siap pakai.

Pemeliharaan adalah suatu tahap yang sangat penting dalam penggunaan barang milik daerah. Tujuan pemeliharaan antara lain :

- a. Untuk merawat sarana dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah.
- b. Barang milik daerah yang dibiayai cukup tinggi melalui APBD pada setiap tahun anggaran maka untuk itu diperlukan pemeliharaannya.

Dalam kewenangan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah ada pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Pengelola bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang di tangan penguasaannya. Semua pejabat di daerah sering melakukan perjalanan dinas atau pengawasan program/kegiatan termasuk di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang menggunakan kendaraan untuk membangun daerahnya menjadi lebih maju dan berkembang. Kendaraan dinas yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan yang Dipelihara/Dibiayai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan(unit)
1.	Roda Empat	10
2.	Roda Dua	15
Jumlah		25

Sumber : Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.2

Jumlah Kondisi Kendaraan dan Pegawai yang Mendapatkan Kendaraan Dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

N O	JENIS KENDARAAN	NOMOR POLISI	JABATAN	Kondisi	KETERANGAN	USIA KENDARAAN
1.	Toyota Fortuner	BG 1359 MZ	Kepala Dinas	Baik	Roda Empat	4 Tahun
2.	Minibus Avanza	BG 1569 LZ	KABID Perikanan Tangkap	Baik	Roda Empat	11 Tahun
3.	Minibus Xenia	BG 1114 LZ	KABID Perikanan Budidaya	Baik	Roda Empat	11 Tahun
4.	Minibus Avanza	BG 1570 LZ	Sekretaris Dinas	Baik	Roda Empat	11 Tahun
5.	Suzuki APV Luxuri	BG 1390 RZ	KABID PUPMHKP	Baik	Roda Empat	9 Tahun
6.	Mitsubishi Tritton	BG 9849 MZ	Pool Dinas	Baik	Roda Empat	7 Tahun
7.	Toyota Hilux Pick Up	BG 9327 MZ	Pool Dinas	Baik	Roda Empat	3 Tahun
8.	Toyota Hilux Pick Up	BG 9832 MZ	BBIS AT	Baik	Roda Empat	3 Tahun

9.	Toyota Rush	BG 1606 LZ	Pool Dinas	Rusak Berat	Roda Empat	11 Tahun
10.	Toyota Kijang Mini Bus	BG 1253 NZ	Pool Dinas	Rusak Berat	Roda Empat	15 Tahun
11.	Toyota Kijang Mini Bus	BG 1231 NZ	Pool Dinas	Rusak Berat	Roda Empat	15 Tahun
12.	Toyota Kijang ST	BG 9042 HZ	BBIS AT	Baik	Roda Empat	18 Tahun
13.	Isuzu Elf Truk Box	BG 8053 MZ	Pasar Higienis Bidang PUPMHKP	Rusak Berat	Roda Empat	12 Tahun
14.	Mitsubishi L 300	BG 1191 PZ	Pool Dinas	Rusak Berat	Roda Empat	8 Tahun
15.	Minibus KIA Pregio	BG 1672 LZ	UPTD LPPMHP	Baik	Roda Empat	13 Tahun
16.	Sepeda Motor Yamaha RX King	BG 5522 NZ	Kabid Perikanan Tangkap	Baik	Roda Dua	13 Tahun
17.	Sepeda Motor Yamaha RX King	BG 3061 PZ	Staf Umum dan kepegawaian	Baik	Roda Dua	13 Tahun
18.	Sepeda Motor Suzuki Thunder	BG 5660 NZ	Kasi Pemasaran Hasil KP	Baik	Roda Dua	13 Tahun
19.	Sepeda Motor Yamaha RX King	BG 5521 NZ	Staf Bidang Perikanan Tangkap	Baik	Roda Dua	13 Tahun
20.	Sepeda Motor Yamaha RX King	BG 5520 NZ	Bendahara APBD	Baik	Roda Dua	13 Tahun
21.	Sepeda Motor Yamaha RX King	BG 3063 PZ	Staf Subbag Keuangan	Baik	Roda Dua	13 Tahun
22.	Sepeda Motor Yamaha RX King	BG 5524 NZ	Staf UPPU pulokerto	Baik	Roda Dua	13 Tahun
23.	Sepeda Motor Yamaha Scorpio	BG 5525 NZ	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Baik	Roda Dua	13 Tahun
24.	Sepeda Motor Yamaha Yupiter	BG 3065 PZ	Staf Bidang PUPMHKP	Baik	Roda Dua	13 Tahun

25.	Sepeda Motor Yamaha Vega R	BG 5523 NZ	Fungsional APHP	Baik	Roda Dua	13 Tahun
26.	Sepeda Motor Honda Supra	BG 6810 MZ	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Baik	Roda Dua	18 Tahun
27.	Sepeda Motor Yamaha Scorpio	BG5528 NZ	KABID PWP, Laut, dan Pulau-pulau kecil	Baik	Roda Dua	13 Tahun
28.	Sepeda Motor Suzuki Thunder	BG 5661 NZ	Kasubbag Keuangan	Baik	Roda Dua	13 Tahun
29.	Sepeda Motor Yamaha	BG 2510 AAZ	Kasi Budidaya Air Payau	Baik	Roda Dua	13 Tahun
30.	Sepeda Motor Honda Mega Pro	BG 3069 PZ	Kasi PWP, Laut, dan pulau-pulau kecil	Baik	Roda Dua	18 Tahun

Sumber : Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat ada dua jenis kendaraan yang di biyai/dipelihara di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yaitu roda empat berjumlah 10 Unit, roda dua berjumlah 15 Unit, dengan total jumlah 25 Unit kendaraan dinas yang dipelihara/dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD). Tabel 1.2 seperti tabel tersebut ada 30 Unit jumlah kendaraan dinas baik itu roda dua dan roda empat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang dibiayai hanya ada 25 kendaraan sesuai pada tabel 1.1. dalam tabel 1.2 ada lima kendaraan yang tidak dibiayai berada pada nomor 9,10,11,13,15 di karenakan anggaran yang tidak memadai atau tidak cukup. Dan rata-rata usia kendaraan dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan diatas 10 tahun keatas Pada, setiap kendaraan memiliki perawatan yang berbeda-beda sesuai dengan usia dan jenis kendaraan masing-masing.

Table 1.3

**Realisasi Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Selatan**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	Rp. 225.000.000	Rp. 177.000.000
2016	Rp. 240.00.000	Rp.230.000.000
2017	Rp. 250.000.000	Rp. 245.000.000

Sumber : Subbagian Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.3 ini menjelaskan anggaran yang didanai untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, dilihat dari realisasi anggaran tahun 2017 untuk pemeliharaan kendaraan dinas hampir semuanya terealisasi, walaupun adanya alokasi anggaran pemeliharaan tidak menjamin kendaraan tetap akan selalu berada pada kondisi yang bagus dan juga setiap kendaraan yang ada di dinas kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera selatan memiliki usia rata-rata diatas 10 tahun. Pada setiap kendaraan memiliki perawatan yang berbeda-beda sesuai dengan usia dan jenis kendaraan masing-masing. Hal tersebut menyangkut dengan masalah yang berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada pengalokasian Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas..

Fenomena yang terjadi dilapangan pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas antara lain Walaupun adanya alokasi anggaran pemeliharaan tetapi masih ada kendaraan dinas yang termasuk dalam daftar aset berada dalam kondisi rusak atau tidak dapat digunakan.

Dilihat dari latar belakang diatas maka peneliti ini ingin meneliti tentang “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat rumusan masalahnya adalah : “Mengapa Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kendaraan Dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

a. Teoritis

Hasil dari penelitian in diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menghasilkan masukan mengenai mengapa efektivitas pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

b. Praktis

Memberikan suatu gambaran atau masukan terhadap instansi pemerintah terhadap instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan kendaraan dinas serta memberikan penjelasan mengapa efektivitas pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengeolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Alfatih, Andy. 2014. *Modul Mata Kuliah Metodologi Penelitian*. Inderalaya: FISIP Universitas Sriwijaya.
- Bastian, Indra, Prof. Dr. 2010. *Metode penelitian administrasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Administrasi Negara*. Inderalaya: FISIP Universitas Sriwijaya.
- Halim 2004. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP YKPN
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo, Prof. Dr. MBA, Ak. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta
- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta : Penerbit Taushia
- Siagian P. Siagian. 2004. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- _____. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suparlan. 2014. *Panduan Lengkap Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Steers, Richard. 1980. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga.

JURNAL

Adelstin Tamasoleng. 2015. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*

(Diakses melalui google pada 14 Juli 2019)

Imanuel Pangkey. 2014. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara*

(Diakses melalui google pada 14 Juli 2019)

INTERNET

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-efektivitas-kerja-adalah.html> di akses tanggal 20/10/2018 Pukul 4.16 WIB

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-keuangan-menurut-para-ahli/> di akses tanggal 21/24/2018 pukul 17.02 WIB

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=83028&obyek_id=4 di akses tanggal 21/10/2018 pukul 21.59 WIB

PERATURAN- PERATURAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13/2006 tentang pengelolaan Keuangan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 17/2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.